

IT. Arsip



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivat No. 47 Palembang Telp (D711) 354137 - 311089 Faximile (0711) 31129 Website: http://www.disdik.sumselprov.go.id Email: disdik.sumselprov@yahoo.co.id

# KEPUTUSAN

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor: 067/7069 /SK/SMK.3/Disdik.SS/2020

# PERSETUJUAN IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Budi Utomo Lubuklinggau

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

#### Menimbang

- Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
  - Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian dilapangan dan syarat-syarat lainnya oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Izin Perpanjangan Operasional dapat dberikan.
  - Maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

# Mengingat

- Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara nomor 4301).
- Undang-undang Republik Indonesia No. 32, Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125 tambahan lembaran Negara no. 4437).
- Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam pendidikan nasional.
- Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor: 37, tambahan Lembaran Negara No. 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1998; Lembaran Negara Tahun 1998 No. 91 tambahan Lembaran Negara No. 3764).
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di Provinsi dan Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Permendikbud No. 20 Tahun 2019, tentang Perubahan Permendikbud No. 51 Tahun 2018 dalam pasal 3 ayat (2) dan Permendikbud No. 44 tahun 2019 tentang PPDB 2020 pada TK, SD, SMP, SMK Sederajat, pada Bab II Pasal 7 Syarat syarat masuk SMA/SMK.
- Data pendukung lainnya dari SMK Budi Utomo Lubuklinggau.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 118/I:11/F/1995, tanggal 28 /Nopember 1995, tentang Persetujuan untuk mendirikan sekolah swasta.
  - 2. Surat Kepala SMK Budi Utomo Lubuk Linggau Nomor : 11/I.11.7/SMK.BU/IX/2020, tanggal 3 September 2020 tentang Perpanjangan Izin Operasional SMK Budi Utomo Lubuklinggau.
  - 3. Naskah Perjanjian Kerjasama antara SMK Budi Utomo Lubuklinggau Nomor : 12/SMK.BU/MOU/VIII/2019 dengan BENGKEL TIMOR, tanggal 19 Agustus 2019.
  - Naskah Perjanjian Kerjasama antara SMK Budi Utomo Lubuklinggau Nomor : 12/SMK.BU/MOU/VIII/2019 dengan BENGKEL NSCB, tanggal 31 Agustus 2019.
  - Naskah Perjanjian Kerjasama antara SMK Budi Utomo Lubuklinggau Nomor : 12/SMK.BU/MOU/VIII/2019 dengan BENGKEL RELLY, tanggal 31 Agustus 2019.

Perjanjian tersebut diatas sebagai tempat prakerin siswa/siswi SMK Muhammadiyah Lubuklinggau.

# MEMUTUSKAN

## Menetapkan Pertama

Memberikan persetujuan izin perpanjangan operasional kepada :

Nama Yayasan : Pendidikan Budi Utomo

Nama Sekolah : SMK Budi Utomo Lubuk Linggau

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 82 Lubuk

Linggau.

Bidang/Program Keahlian : - Teknik Otomotif,

Teknik Elektronika

Kompetensi Keahlian : - Teknik Kendaraan Ringan Otomotif.

- Tehnik Audio Video

Kedua

: Pemberian persetujuan izin perpanjangan operasional tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) 1 tahun (dari 4 September 2020 s.d. 4 September 2021) sejak tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

Ketiga

: Bahwa Pemegang Surat ini :

- Wajib menyelenggarakan sekolah dengan baik, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapalan tujuan pendidikan.
- 2. Wajib mentaati Peraturan Pemerintah yang sudah ada dan yang akan ditentukan kemudian yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
- Wajib menggunakan kurikukum yang berlaku.

Keempat

: Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini

akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di

Palembang

Pada tanggal

D I N A

4 September 2020

Kepala, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan,

DIS H. RIZA FAHLEVI, M.M.

Pembiha Utama Madya NIP 196304091988031007

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta

Sekjen Depdikbud di Jakarta

3. Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud di Jakarta

4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Lubuk Linggau